

KEKUASAAN DAN ELIT POLITIK DALAM ISLAM

Oleh
Ajat Sudrajat

Abstrak

Peranan kelompok elit dalam kehidupan politik sangat dominan. Dominasi mereka tidak terbatas dalam bentuk pemerintahan yang absolut, bahkan dalam bentuk pemerintahan yang lain seperti dalam pemerintahan demokrasi misalnya. Karena dominasinya yang begitu besar, sampai-sampai ada seorang ilmuwan politik --Gaetano Mosca-- yang menyatakan bahwasannya kelompok elit ini telah mengarahkan kehidupan politik pada bentuk pemerintahan oligarkis.

Pada saat yang bersamaan, dibandingkan dengan sejarah kehidupan pemerintahan dalam Islam, gambaran elit politik seperti di atas juga tampak jelas. Hanya saja memang terdapat tarik menarik di dalamnya antara kemungkinan yang mengarah kepada pemerintahan oligarkis, di samping adanya tawaran bentuk pemerintahan yang demokratis.

Pendahuluan

Berangkat dari pengertian dasarnya, sebutan elit adalah istilah umum yang dipakai untuk menunjuk pada suatu kelompok dalam masyarakat yang mendapat kualifikasi istimewa atau menempati kedudukan tertinggi dalam suatu lapisan masyarakat (Hasan Shadily, 1980:917). Kenyataan yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa kelompok elit merupakan kelompok yang terdiri dari berbagai kalangan: politik, militer, sosial ekonomi dan kebudayaan. Lebih jauh dasar pengelompokan seseorang dalam kategori kelompok elit, juga memperlihatkan cara yang berbeda-beda, bisa karena dasar keturunan (kelahiran), kekayaan dan pengetahuan-pendidikan.

Di antara kelompok-kelompok elit di atas, yang biasanya paling banyak menarik perhatian adalah kelompok elit di bidang politik. Penyebutan kelompok ini (politik), tidak berarti menaifkan pada peran kelompok elit yang lain. Masalahnya adalah karena selalu ada hubungan yang dekat sekali antara kelompok-kelompok elit dengan peran-peran yang

mereka mainkan dengan persoalan-persoalan di bidang politik. Setidaknya dapat dikatakan bahwa keberadaan dan peran kelompok elit ini berpengaruh terhadap putusan politik. Kemencapaian kelompok elit di bidang politik ini terutama adalah karena dominasi mereka di bidang kekuasaan atau --kalau boleh dikatakan-- karena merekalah pemegang kendali kekuasaan.

Elit Politik dan Kekuasaan

Untuk memisahkan kelompok elit politik dari kekuasaan adalah suatu yang sulit dilakukan, atau bahkan mustahil. Dua komponen ini ibarat dua muka dari satu mata uang. Adanya kekuasaan memastikan berperannya kelompok elit politik di dalamnya, dan sebaliknya kelompok elit politik akan senantiasa menghajatkan suatu struktur kekuasaan untuk merumuskan gagasan-gagasan politiknya. Dari kenyataan yang seperti inilah pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kelompok elit politik sangat berperan dalam suatu sistem pemerintahan.

Betapa besar peran kelompok elit politik dalam suatu sistem pemerintahan dapat dilihat dari sejumlah konsep yang berkembang di sekitar pokok masalah ini. Misalnya, dengan teori elit politik yang bersandar pada kenyataan yang dijumpai dalam setiap masyarakat, yaitu akan adanya dua kategori yang tetap antara (1) sekelompok kecil orang yang memerintah, dan (2) sejumlah besar massa yang diperintah (Varma, 1990:199). Dua kategori semacam ini, pada satu sisi dapat diakui sebagai kenyataan yang mengikat kehidupan manusia secara keseluruhan. Pada sisi yang lain, secara telak berarti menolak konsep Mark mengenai komunisme yang meniadakan adanya kelas-kelas dalam masyarakat (Deliar Noer, 1982:162-5). Namun demikian, yang menjadi pokok masalahnya di sini --barangkali-- bukanlah pada adanya dua kategori yang tetap dan alamiah tersebut. Akan tetapi, yang mesti dipermasalahkan adalah peran yang dimainkan oleh kelompok kecil tersebut (elit) terhadap massa yang besar. Meskipun disadari juga bahwa munculnya kelompok elit ke permukaan tentu saja ada yang merupakan representasi dari kelompok massa yang besar atau setidaknya mendapat dukungan dari sejumlah besar massa.

Dari sejumlah pemikiran politik mengenai kelompok elit politik ini, salah satu di antaranya yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pemikiran yang dikemukakan Gaetano Mosca (1858-1941). Ia mengemukakan bahwa dalam semua masyarakat, dari yang masih bersahaja sampai pada masyarakat yang paling maju, akan selalu muncul dua kelompok atau kelas dalam masyarakat, yaitu: kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama --yang biasanya jumlahnya lebih sedikit-- memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua --yang jumlahnya lebih besar-- biasanya diatur dan dikontrol oleh yang pertama. Kelas yang pertama biasanya menempatkan dirinya untuk memperoleh keistimewaan-keistimewaan yang harus diakui dan direstui oleh kelas kedua.

Berdasarkan pada pemikiran yang demikian pada akhirnya ia sampai pada suatu kesimpulan untuk menolak adanya klasifikasi bentuk-bentuk pemerintahan ke dalam monarki, aristokrasi dan demokrasi sekalipun. Ia dengan tegas sekali menyatakan bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan dalam sejarah kehidupan kenegaraan, yaitu bentuk oligarki (Varma, 1990:204).

Apa yang menjadi kesimpulan Mosca tentu saja menarik untuk diperhatikan. Hasil kesimpulan yang demikian dapat dipandang sebagai sebuah referensi untuk menganalisis berjalannya suatu sistem pemerintahan dan terutama sekali perilaku politik kelompok elitnya sebagai pengendali kekuasaan. Mencermati kesimpulan yang dikemukakannya di atas, sepertinya kita menangkap adanya kejujuran dalam pikiran Mosca. Suatu ungkapan yang menuju pada hakikat mengenai kenyataan naluriah kekuasaan. Bagaimanapun tentu diakui bahwa keinginan untuk berkuasa dimiliki dan dikehendaki oleh setiap individu maupun kelompok. Dan tentu saja, kalau memungkinkan bagi suatu kelompok, kekuasaan itu tetap berada di tangannya. Untuk itulah dapat kita temukan dan bisa dilihat sederetan praktik-praktik yang dilakukan kelompok elit penguasa untuk dapat mengekalkan kekuasaannya.

Dalam banyak kasus --dengan mengikuti alur pemikiran Mosca-- suatu label dari sistem pemerintahan bisa mengatasmakan monarki, aristokrasi dan demokrasi sekalipun, dengan sejumlah versinya. Namun, pada kenyataannya ke-

kuasaan itu dikendalikan oleh sekelompok kecil orang. Yang menurut pemikiran Mosca, sekalipun kelompok kecil ini tetap berdiri di belakang massa yang banyak dari pendukungnya, adalah merupakan kumpulan yang terdiri dari individu-individu yang superior. Inilah yang dipandang sebagai hakikat dari suatu sistem pemerintahan yang telah berlaku dalam peradaban sejarah manusia (Varma, 1990:205-6).

Salah satu penyebab munculnya pemerintahan yang oligarkis di atas, seperti dikemukakan Michels terutama adalah karena sikap apatis, malas, dan berjiwa budak dari masyarakatnya. Keadaan yang seperti ini yang akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan kekuasaan sebagai alat penekan dan pemaksa. Dengan demikian, mereka akan dengan mudah mengambil keuntungan-keuntungan dan terutama dalam melestarikan posisi kekuasaan mereka (Varma, 1990:207). Sikap lain yang bisa mendukung keberadaan pemerintahan oligarkis adalah adanya sikap paternalistik. Sikap paternalistik masyarakat memberikan andil besar terhadap berlangsungnya suatu pemerintahan oligarkis yang berkepanjangan karena dari sikap ini melahirkan sikap ketergantungan kepada penguasa. Dalam keadaan seperti ini maka tidak akan pernah terpikir oleh masyarakat untuk mengadakan pemberontakan atau revolusi.

Memahami esensi pemikiran Mosca, memang kita bisa menangkap kebenaran yang terdapat di dalamnya. Kebenaran itu adalah pada kenyataan bahwa yang memerintah itu adalah sekelompok kecil individu atas mayoritas massa. Akan tetapi, kebenaran yang dikemukakan Mosca, pada saat yang sama dapat pula dipandang sebagai kelemahan pemikirannya. Kelemahannya adalah karena Mosca dengan tanpa membuat perbedaan-perbedaan menyamakan begitu saja dengan pukul rata semua jenis sistem pemerintahan. Kita memang harus mengakui bahwa dalam suatu pemerintahan apa pun, kecuali negara yang diidealkan oleh Rousseau yang berbentuk negara kota (Deliar Noer, 1982:112-3), bahkan yang paling demokratis sekalipun, kelompok penguasa merupakan atau terdiri dari sejumlah kecil individu. Meskipun kecenderungan pemerintahan seperti ini, yang mengarah pada pemerintahan oligarkis itu ada, itu tidak berarti bahwa kelompok penguasa tersebut sepenuhnya berlaku oligarkis. Yang dalam pandangan Aristoteles bahwa pemerintahan yang oligarkis cenderung

untuk menjadi korup dan tiran (Hasan Shadily, 1980:2432). Pemikiran Mosca yang demikian, barangkali akan menemukan kebenarannya, terutama sekali apabila dikaitkan dengan pemerintahan yang fasis dan monarki absolut. Dan pemikiran yang dikemukakan Mosca tentu saja tidak lepas dari pengaruh sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Italia. Pemerintahan yang menjadi objek kajian Mosca adalah Italia yang masih bersifat agraris dalam bidang perekonomiannya, sedang struktur politik dan pemerintahannya boleh dikatakan bersifat feodal (Suzanne Keller, 1989:viii). Jadi, tidak mengherankan kalau ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa semua sistem pemerintahan pada dasarnya adalah oligarkis.

Seperti kita ketahui, dan ini disadari sendiri oleh Mosca, dua kategori tetap antara yang memerintah dan yang diperintah akan selalu ada. Berbeda dengan pemerintahan yang menganut fasisme atau monarki absolut, dalam suatu pemerintahan yang menganut paham demokrasi, sekalipun kelompok elit penguasa adalah sejumlah kecil orang, tetapi pada hakikatnya mereka adalah merupakan representasi dari sejumlah besar massa pendukungnya. Oleh karena itu, pada suatu pemerintahan yang demikian tidak bisa disebutkan sebagai suatu pemerintahan yang oligarki.

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis misalnya, di mana elit penguasa mewakili sejumlah besar massa, maka sikap dan perilaku politik penguasa akan senantiasa dikontrol oleh massa pendukungnya. Karena kontrol itu berasal dari pihak intern (dalam), maka munculnya kecenderungan yang bersifat oligarkis akan dapat dihindari. Walaupun ada beberapa hak istimewa, atau hak-hak lainnya, ini tentu saja merupakan akibat langsung dari peran politik yang dilakukannya. Dalam hal semacam ini, selama tidak mengarah pada sikap korup dan tiran barangkali masih merupakan suatu kewajaran.

Pada saat yang sama, seperti terlihat di negara-negara maju, di mana pemerintah membolehkan adanya partai oposisi, maka kemungkinan akan berlangsungnya suatu pemerintahan oligarki juga sangat kecil. Dalam suatu pemerintahan yang demikian akan selalu ada persaingan di antara dua pihak untuk memberikan yang terbaik pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Karena adanya kontrol yang terus menerus dari dua pihak yang bersaing, maka kecil sekali akan terjadinya sikap korup dan tiran dari pihak penguasa.

Lebih jauh, Mosca juga percaya dengan teori pergantian kelompok elit tersebut. Dengan cara yang jelas teori ini mengungkapkan bahwa karakteristik yang membedakan elit politik satu dengan lainnya adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Apabila kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakatnya, sementara pada saat bersamaan ada kelompok elit politik lain yang mampu menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat kemungkinan kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Suatu teori yang serupa pernah dikemukakan oleh Ibn Khaldun bahwa kelompok yang kuat secara politik akan merebut kekuasaan yang lemah (Ibn Khaldun, 1986:379). Dengan teori pergantian elit ini, sebenarnya kekhawatiran Mosca mengenai munculnya suatu pemerintahan oligarkis bukan sesuatu yang harus dicemaskan. Seditaknya kelemahan-kelemahannya yang akan mengarah kepada model oligarkis akan terkontrol oleh adanya elit politik tandingan.

Negara Berkembang, Kelompok Elit dan Kemungkinan Oligarkis

Seperti telah disebutkan di muka, salah satu penyebab munculnya suatu pemerintahan oligarkis, terutama adalah karena sikap apatis, malas dan jiwa budak yang dimiliki masyarakat sehingga tidak mampu memerintah diri sendiri. Kelompok-kelompok tertentu yang menjadi elit politik dalam negara semacam ini akan dengan mudah mengambil keuntungan-keuntungan dari kualitas tersebut untuk melestarikan kekuasaan mereka. Sekali mereka menduduki puncak kekuasaan, tak satu pun di antara masyarakatnya yang dapat menjatuhkannya. Ditambah lagi dengan sikap yang paternalistik, maka lengkaplah bagi penguasa politik untuk secara leluasa bertindak korup, tiran dan nepotis.

Kalau memperhatikan ciri-ciri yang demikian, maka kita akan menemukan relevansinya pada fenomena yang terdapat di banyak negara yang sedang berkembang. Pada negara-negara ini, di mana tingkat kehidupan perekonomian rakyat-negara masih lemah, juga tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, maka munculnya suatu sistem

pemerintahan yang cenderung oligarkis menjadi sangat besar. Dan yang lebih menonjol lagi adalah ditemukannya kenyataan bahwa yang berkuasa di banyak negara yang sedang berkembang adalah rezim militer. Oleh karena itu, menghubungkan pikiran Mosca pada kasus-kasus ini akan menemukan kebenarannya.

Kekuasaan dan Elit Politik dalam Islam

Memperhatikan perjalanan sejarah pemerintahan dalam Islam pada periode awal, kita sepintas akan dibawa pada suatu kesimpulan bahwa kelihatannya tidak ada suatu bentuk pemerintahan tertentu yang dibakukan dalam Islam. Tampaknya tidak ada pernyataan yang tegas dalam Islam mengenai bentuk suatu pemerintahan. Karena, dalam kenyataannya baik pemerintahan yang bercorak demokratis, aristokratis dan monarkis telah diterima dalam Islam. Prinsip musyawarah yang biasanya dijadikan sebagai obor suatu pemerintahan ternyata ditemukan dalam ketiga corak pemerintahan tersebut. Apa pun namanya suatu pemerintahan kelihatannya tidak dipermasalahkan, yang penting prinsip musyawarah dijalankan.

Namun demikian, kalau ditelusuri lebih jauh lagi, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan lain yang berbeda. Bagaimanapun juga tentu tidak dapat dipungkiri bahwa Islam bertumpu pada perilaku --sunnah-- Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini maka praktik yang beliau lakukan itulah yang mesti dijadikan sebagai pegangan. Dan secara lebih tegas, praktik yang beliau lakukan itu telah pula diikuti oleh para sahabat terdekatnya yang juga telah memimpin negara di Madinah saat itu. Dari sini kita dapat berkesimpulan bahwa model pemerintahan yang ditawarkan Islam dan ini telah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya --khulafa al-rasyidin-- adalah suatu pemerintahan yang bercorak demokratis dengan prinsip musyawarah sebagai sumber utamanya.

Di sisi lain kalau diperhatikan secara seksama, praktik pemerintahan dalam Islam akan terlihat dengan jelas betapa peran kelompok elit begitu dominan. Secara umum hal itu terlihat dan tercermin dari pengakuan kalangan *Sunni* terhadap kemutawatiran dan keberlakuan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi 'al-aimmatu min quraisy' (Imam-imam itu hendaknya dari kalangan golongan Quraisy) (Harun Nasution,

1978:96). Karena alasan hadis inilah, pertikaian yang terjadi antara kelompok Anshar dan Muhajirin sewaktu Nabi wafat, yang hampir memporak-porandakan kesatuan umat Islam pada saat pemilihan khalifah pertama dapat diatasi.

Hal lain yang menguatkan peran politik elit Quraisy ini terlihat pada kekuasaan Abbasiyah pada kurang lebih 350 tahun terakhir dari kekuasaannya yang mencapai 500 tahun. Sekalipun secara de facto kekuasaan para khalifahny sudah dipegang oleh para sultan dan amir, khalifah-khalifah Abbasiyah dari keturunan Quraisy ini secara turun temurun tetap dipertahankan (M.Watt, 1990:97-295). Sampai akhirnya kekhalifahan Islam dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258M.

Betapa besar peran yang dimainkan oleh elit politik ini dalam pemerintahan Islam, baik yang melalui versi Sunni dengan al-aimmatu min Quraisynya atau versi Syiah yang mengutamakan keturunan Nabi dari jalur perkawinan Ali dan Fatimah. Sampai akhirnya datang Ibn Khaldun memberikan penafsiran terhadap hadis yang dipegangi kaum Sunni di atas, meskipun pada dasarnya masih mengacu pada kualifikasi ke Quraisy (Deliar Noer, 1982:58-9). Hal ini beliau lakukan karena pada saat itu sudah tidak ada lagi pemerintahan yang secara langsung di bawah penguasa keturunan Quraisy. Tetapi yang jelas, golongan Quraisy telah menempati hak istimewa dalam politik Islam.

Seperti kita ketahui keempat khalifah yang menggantikan Nabi, di samping merupakan golongan elit Quraisy, mereka pun adalah merupakan kelompok elit dari masyarakatnya, yaitu kaum Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang selama hidup Nabi merupakan orang-orang yang dekat (sahabat dekat) dengan beliau. Lebih jauh, pemerintahan baik dinasti Umayyah maupun Abbasiyah tidak pernah lepas dari lingkaran kelompok elit Quraisy. Umayyah misalnya, dinasti didirikan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, di samping termasuk kelompok sahabat Nabi, pada masa jahiliyah klan Abi Sufyan merupakan penguasa yang memerintah kota Mekkah bersama-sama dengan klan lainnya. Klan Abi Sufyan lebih dikenal lagi karena mereka menguasai sektor perekonomian --perdagangan. Begitu pula dengan Abbasiyah, mereka adalah orang-orang yang semasa jahiliyah merupakan kelompok yang senantiasa bersaing dengan klan lainnya, sekalipun masih sesama

Quraisy. Dan yang terpenting diketahui kedua klan ini adalah masih merupakan kerabat Nabi Muhammad saw.

Berbeda dengan paham yang dianut kalangan Sunni adalah paham Syi'ah. Syiah berpaham bahwa yang berhak memegang kendali kekuasaan adalah keluarga Nabi Muhammad saw dari jalur Ali ibn Abi Thalib dan Fatimah (Harun Nasution, 1979:97-103). Dalam keyakinan Syi'ah dipahami bahwa yang menggantikan Nabi setelah wafat mestinya adalah Ali ibn Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Ali menurut mereka telah mendapat wasiat dari Nabi untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan.

Dari dua kasus di atas, meskipun kalau dilihat asal usulnya adalah masih tergolong Quraisy, kenyataan itu menunjukkan adanya persaingan di antara kelompok elitnya. Masing-masing menggunakan dalil *naql* untuk menguatkan posisi mereka di hadapan umat. Pada saat yang bersamaan muncul pula pemikiran lain yang lebih demokratis, yaitu dari kalangan Khawarij. Golongan ini menghendaki agar khalifah atau Imam tidak mesti harus dari orang Quraisy, tetapi yang pasti adalah dari orang Islam.

Kembali kepada pemikiran Mosca, pemerintahan Islam yang dipimpin oleh keempat khalifahnyanya adalah berbentuk pemerintahan yang mempunyai corak demokratis-aristokrat. Kenyataan ini berdasar pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh para bangsawan Arab Quraisy. Sekalipun pemerintahan saat itu bercorak aristokratis, dalam praktiknya pemerintahan keempat sahabat Nabi ini memperlihatkan pemerintahan yang demokratis. Mereka sedikit pun tidak memperlihatkan kecenderungannya pada apa yang dituduhkan Mosca dengan pemerintahan yang oligarkis.

Berbeda dengan pemerintahan keempat khalifah di atas adalah pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan, peletak dasar berdirinya dinasti Umayyah, merupakan orang pertama yang mengubah sistem pemerintahan dari corak yang demokratis kepada pemerintahan yang berbentuk monarkis (M.Watt, 1990:20-21). Sejak Muawiyah inilah mulai berlakunya sistem pemerintahan monarki, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Abbasiyah dan pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya, di antaranya yang besar ialah Imperium Turki Usmani di Turki, dinasti Sfawiyah di Iran dan dinasti Islam di India. Secara praktis dapat dikata-

